

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2018). Sektor publik berkaitan dengan penerapan serta perlakuan akuntansi domain publik. Domain publik secara kelembagaan terdiri dari badan-badan pemerintah perusahaan milik negara, yayasan, organisasi politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi massa, dan organisasi nirlaba lainnya.

Dalam menjalankan aktivitasnya sektor publik memerlukan konsep mendasar pada pengelolaannya yang berupa tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

1. Ekonomi merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Hal ini mengartikan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu dengan perbandingan *output/input* standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

3. Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan publik serta bertanggungjawab kepada masyarakat organisasi terkait dengan sumber dana yang digunakan organisasi dalam pemberian pelayanan publik.

2.2. Organisasi Nonlaba

2.2.1. Pengertian Organisasi Nonlaba

Organisasi nirlaba merupakan tipe organisasi *pure-nonprofit organization* untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mahsun dkk, 2013). Entitas nirlaba menurut PSAK 45 merupakan entitas tidak berorientasi pada laba tetapi memiliki kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dibutuhkan dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Dalam organisasi nirlaba yang termasuk dalam entitas tersebut adalah kelompok organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba non pemerintah. Contoh dari organisasi nirlaba non pemerintah yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Yayasan, Organisasi Keagamaan, dan Organisasi Pendidikan dan Kesehatan (Glennardo, 2016).

Standar keuangan yang direvisi diatur oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan bahwa adanya penyempurnaan dalam aturan pedoman penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba

sehingga Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang diatur dalam ISAK 35 sebagai pengganti dari PSAK 45. Aturan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2020. Perbedaan yang ada diantara standar tersebut adalah perubahan penyebutan organisasi nirlaba yang diubah menjadi nonlaba. Kemudian penyajian laporan keuangan yang sebelumnya hanya empat jenis laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan/neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 yang berubah menjadi lima jenis laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 yang diatur dalam PSAK 1 yaitu penyajian laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, laporan penghasilan komprehensif, dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut ISAK 35 entitas nonlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Organisasi nonlaba lebih mengutamakan kepentingan umum dengan tidak mengambil keuntungan untuk organisasinya sendiri tetapi mereka memiliki tujuan mulia yang dibuat secara bersama-sama pada organisasi tersebut.

2.2.2. Karakteristik Organisasi Nonlaba

Menurut ISAK 35 karakteristik entitas atau organisasi nonlaba berbeda dengan entitas bisnis berorientasi laba. Dalam melakukan aktivitas operasinya entitas berorientasi nonlaba akan memperoleh

sumber daya yang dibutuhkan. Hal inilah yang menjadi salah satu perbedaannya. Secara umum entitas/organisasi nonlaba tidak mengharapkan pembayaran kembali dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

2.3. Gereja

2.3.1. Pengertian Gereja

Menurut Katolisitas (2008), gereja merupakan kumpulan orang-orang yang sudah dibaptis yang disatukan dalam iman sejati yang satu, dalam liturgi dan sakramen yang sama dibawah otoritas Paus dan para uskup dalam persekutuan dengan Paus. Gereja memiliki sifat yang umum yang berarti secara keseluruhan dimana tempat berkumpulnya orang beriman diseluruh dunia.

Gereja merupakan entitas nonlaba yang memiliki keterikatan dengan pihak internal dan eksternal atau *stakeholder* sehingga hubungan ini memberikan kebutuhan akan pertanggungjawaban atau akuntabilitas gereja katolik terhadap *stakeholder* (Setiawan, 2014).

Selama ini gereja menerima sumber dana dari pihak eksternal untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan operasional maupun non operasional serta untuk mengadakan aktivitas yang meningkatkan pelayanan kepada umat di gereja. Berkaitan dengan penerimaan kegiatan ini gereja tidak mengambil keuntungan oleh karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban gereja terhadap pihak eksternal atau *stakeholder* maka diwujudkanlah penyajian laporan keuangan.

Hal ini berkaitan dengan dana kolekte yang masuk setelah kegiatan misa/ibadat dan sumbangan dari para donatur eksternal. Penyajian laporan keuangan tersebut nantinya akan disampaikan oleh gereja kepada umat atau *stakeholder* sehingga ini membuat laporan menjadi lebih transparansi.

2.3.2. Pengertian Paroki

Paroki merupakan salah satu organisasi gereja yang memiliki perbedaan pada karakteristiknya (PDDP KAS, 2013). Menurut Kitab Hukum Kanonia (515:1), paroki sendiri adalah komunitas kristiani yang permanen pada gereja partikular yang reksa pastoralnya berada dibawah otoritas uskup diosesan, sehingga dipercayakan pada pastor paroki sebagai gembalanya sendiri. Bagian-bagian dalam suatu paroki biasa disebut sebagai wilayah, lingkungan dan kelompok kategorial serta unit karya, tempat ziarah milik paroki dan lembaga karya yang didirikan oleh paroki (PPDP KAS, 2013).

2.3.3. Keuangan Paroki Gereja

2.3.3.1. Sumber Dana Paroki

Sumber dana yang terdapat pada paroki diantaranya berupa kolekte dan sumbangan dari umat. Kolekte merupakan persembahan dari umat yang dikumpulkan ketika misa ataupun kegiatan ibadat di luar gereja yang biasa dilakukan oleh wilayah atau lingkungan. Dana tersebut, kemudian akan dihitung oleh pihak yang bertugas kemudian dicatat dalam formulir pencatatan sebagai

pertanggungjawaban atas dana pada kegiatan saat itu. Lalu terkait dengan sumbangan merupakan pemberian secara sukarela yang dilakukan oleh umat tertentu yang memberikan uang tunai secara pribadi kepada Paroki Gereja.

2.3.3.2. Informasi Keuangan Paroki

Dalam menyampaikan informasi mengenai keuangan Paroki menurut PPAP 2018 harus memenuhi karakteristik kualitatif fundamental yaitu:

1. Relevansi

Informasi keuangan akan relevan bila informasi keuangan memiliki nilai prediktif, nilai konfirmatori atau keduanya,

2. Representasi Tepat

Representasi tepat yaitu pengakuan oleh Dewan Paroki, baik secara tersirat atas isi laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, untuk memenuhi supaya informasi menjadi berguna yaitu karakteristik peningkat sebagai berikut:

1. Informasi Komparatif

Keterbandingan berkaitan dengan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan yang dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya,

2. Keterverifikasian

Laporan keuangan dapat diuji jika pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda,

3. Ketepatanwaktuan

Karakteristik informasi keuangan dalam periode pelaporan serta dasar penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan,

4. Keterpahaman

Pemahaman mengenai bahasa yang digunakan dalam laporan keuangan, materialitas dan agregasi serta satuan mata uang yang digunakan dalam pelaporan.

2.4. Laporan Keuangan

2.4.1. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Entitas Nonlaba

Menurut Mardiasmo (2018) tujuan dan fungsi laporan keuangan entitas nonlaba adalah:

1. Kepatuhan dan pengelolaan

Memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang diterapkan.

2. Akuntabilitas

Bentuk pertanggungjawaban kepada publik bahwa laporan keuangan digunakan untuk memonitori kinerja dan mengevaluasi pencapaian atas tujuan yang ditetapkan.

3. Perencanaan dan informasi otorisasi

Memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang.

4. Kelangsungan organisasi

Membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi dapat meneruskan menyediakan barang/jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang.

5. Hubungan masyarakat

Memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai atau sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber fakta dan gambaran

Memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

2.4.2. ISAK 35

Pada tanggal 1 Januari 2020 IAI resmi memutuskan ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba efektif dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba sebagai pengganti PSAK 45. Peralihan pedoman dalam penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba ini karena dengan diadopsinya IAS 1 *Presentation of Financial Statement* menjadi PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan,

sehingga Dewan Standar Akuntansi Keuangan berpandangan perlu adanya Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan untuk memberikan pedoman dalam penyajian laporan keuangan entitas nonlaba (ISAK 35).

Menurut ISAK 35 penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba merupakan penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba. Organisasi tersebut yang termasuk salah satunya adalah gereja. Adapun kepentingan dalam menilai penggunaan laporan keuangan organisasi nonlaba sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dipercaya dapat dilihat dari cara manajemennya,
2. Dalam pembuatan keputusan ekonomik dapat dinilai berdasarkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat.

2.4.2.1. Interpretasi

Menurut ISAK 35 interpretasi dalam penyajian laporan keuangan entitas nonlaba yaitu:

1. Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba disusun berdasarkan syarat penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan yang telah diatur dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan,

2. Entitas berorientasi nonlaba untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dapat membuat penyesuaian deskripsi,
3. Entitas berorientasi nonlaba dapat menyesuaikan deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan itu sendiri. Dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan judul pada laporan keuangan,
4. Entitas berorientasi nonlaba lebih baik mempertimbangkan terkait fakta dan keadaan relevan dalam menyajikan laporan keuangannya. Dalam informasi yang disajikan supaya tidak mengurangi kualitas informasi tersebut maka catatan atas laporan keuangan perlu disajikan.

2.4.2.2. Bentuk Laporan Keuangan

Pada penyajian laporan keuangan terdapat lima bentuk laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan

Dalam laporan posisi keuangan terdapat dua format untuk menyajikan informasi yang dimana setiap formatnya memiliki keunggulan masing-masing.

- a. Informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya disajikan

pada format A. Namun jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan maka entitas menyajikan informasi tersebut sesuai dengan kelas aset netonya. Berikut contoh bentuk penyajian laporan keuangan posisi keuangan dengan format A:



ENTITAS ZXC
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20x2
(dalam jutaan rupiah)

ASET	20x2	20x1
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	xxx	xxx
Piutang Bunga	xxx	xxx
Investasi jangka pendek	xxx	xxx
Aset lancar lain	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Total Aset Lancar	xxx	xxx
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	xxx	xxx
Investasi jangka panjang	xxx	xxx
Aset tetap	xxx	xxx
Total Aset Tidak Lancar	xxx	xxx
TOTAL ASET	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
LIABILITAS		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima dimuka	xxx	xxx
Utang jangka pendek	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Total Liabilitas Jangka Pendek	xxx	xxx
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
Liabilitas imbalan kerja	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Total Liabilitas Jangka Panjang	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Total Liabilitas	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
ASET NETO		
<i>Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya</i>		
Surplus akumulasian	xxx	xxx
Penghasilan komprehensif lain*)	xxx	xxx
<i>Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>		
Total Aset Neto	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

Gambar 2. 1 Laporan Posisi Keuangan (Format A)
Sumber : ISAK 35

- b. Format B tidak menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri.

Berikut format B pada laporan posisi keuangan:

ENTITAS ZXC
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20x2
(dalam jutaan rupiah)

ASET	20x2	20x1
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	xxx	xxx
Piutang Bunga	xxx	xxx
Investasi jangka pendek	xxx	xxx
Aset lancar lain	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Total Aset Lancar	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Aset Tidak Lancar		
Properti investasi	xxx	xxx
Investasi jangka panjang	xxx	xxx
Aset tetap	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Total Aset Tidak Lancar	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
TOTAL ASET	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Pendapatan diterima dimuka	xxx	xxx
Utang jangka pendek	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Total Liabilitas Jangka Pendek	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
Liabilitas imbalan kerja	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Total Liabilitas Jangka Panjang	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Total Liabilitas	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
ASET NETO		
<i>Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya</i>	xxx	xxx
<i>Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Total Aset Neto	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

Gambar 2. 2 Laporan Posisi Keuangan (Format B)
Sumber : ISAK 35

2. Laporan Penghasilan Komprehensif

Dalam penggunaan istilah “penghasilan komprehensif” ini menunjukkan jumlah dari surplus (defisit) dan penghasilan komprehensif lainnya. Adapun 2 format pada laporan penghasilan komprehensif sebagai berikut:

- a. Untuk memudahkan penyusunan laporan secara komparatif maka, format A menyajikan informasi dalam bentuk kolom tunggal. Berikut contoh bentuk penyajian laporan keuangan penghasilan komprehensif dengan format A:

ENTITAS ZXC
Laporan Penghasilan Komprehensif
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20x2
(dalam jutaan rupiah)

TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	20x2	20x1
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	xxx	xxx
Jasa layanan	xxx	xxx
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	xxx	xxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxx	xxx
Lain-lain	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Total Pendapatan	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<i>Beban</i>		
Gaji, upah	(xxx)	(xxx)
Jasa dan profesional	(xxx)	(xxx)
Administratif	(xxx)	(xxx)
Depresiasi	(xxx)	(xxx)
Bunga	(xxx)	(xxx)
Lain-lain	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Total Beban (catatan E)	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Surplus (Defisit)	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan		
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxx	xxx
Total Pendapatan	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Surplus (Defisit)	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

Gambar 2. 3 Laporan Penghasilan Komprehensif (Format A)
Sumber : ISAK 35

b. Format B menyajikan informasi sesuai pengelompokan aset neto. Berikut contoh bentuk format B pada laporan penghasilan komprehensif:

ENTITAS ZXC
Laporan Penghasilan Komprehensif
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20x2
(dalam jutaan rupiah)

	20X2			20X1		
	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah
PENDAPATAN						
Sumbangan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Jasa layanan	xxx	-	xxx	xxx	-	xxx
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	xxx	-	xxx	xxx	-	xxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	-	xxx	xxx	-	xxx
Total pendapatan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
BEBAN						
Gaji, upah dan jasa profesional	(xxx)	-	(xxx)	(xxx)	-	(xxx)
Administratif	(xxx)	-	(xxx)	(xxx)	-	(xxx)
Depresiasi	(xxx)	-	(xxx)	(xxx)	-	(xxx)
Bunga	(xxx)	-	(xxx)	(xxx)	-	(xxx)
Lain-lain	(xxx)	-	(xxx)	(xxx)	-	(xxx)
Total Beban (catatan E)	(xxx)	-	(xxx)	(xxx)	-	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	xxx	-	xxx	xxx	-	xxx
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Gambar 2. 4 Laporan Penghasilan Komprehensif (Format B)
Sumber : ISAK 35

3. Laporan Perubahan Aset

ENTITAS ZXC
Laporan Perubahan Aset Neto
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20x2
(dalam jutaan rupiah)

ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	20x2	20x1
Saldo Awal	xxx	xxx
<i>Surplus tahun berjalan</i>	xxx	xxx
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Saldo Akhir	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Penghasilan Komprehensif Lain		
Saldo awal	xxx	xxx
Penghasilan komprehensif tahun berjalan***)	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Saldo akhir	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Total	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo Awal	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Surplus tahun berjalan	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Aset neto yang dibebaskan pembatasan (catatan C)	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Saldo akhir	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
TOTAL ASET NETO	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

Gambar 2. 5 Laporan Perubahan Aset Neto
Sumber : DE ISAK 35

4. Laporan Arus Kas

ENTITAS ZXC
Laporan Arus Kas (Metode Langsung)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20x2
(dalam jutaan rupiah)

AKTIVITAS OPERASI	20x2	20x1
Kas dari sumbangan	xxx	xxx
Kas dari pendapatan jasa	xxx	xxx
Bunga yang diterima	xxx	xxx
Penerimaan lain-lain	xxx	xxx
Bunga yang dibayarkan	(xxx)	(xxx)
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	(xxx)	(xxx)
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(xxx)	(xxx)
Penerimaan dari penjualan investasi	xxx	xxx
Penerimaan hasil investasi	xxx	xxx
Pembelian investasi	(xxx)	(xxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
AKTIVITAS PENDANAAN		
<i>Penerimaan dari sumbangan dibatasi untuk:</i>		
Investasi dalam dana abadi (endowment)	xxx	xxx
Investasi bangunan	xxx	xxx
Aktivitas pendanaan lain:		
Pembayaran utang jangka panjang	(xxx)	(xxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	xxx	xxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

Gambar 2. 6 Laporan Arus Kas (Metode Langsung)
Sumber : ISAK 35

ENTITAS ZXC
Laporan Arus Kas (Metode Tidak Langsung)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20x2
(dalam jutaan rupiah)

	20x2	20x1
AKTIVITAS OPERASI		
Rekonsiliasi surplus (defisit) menjadi kas neto dari aktivitas operasi:		
Surplus	xxx	xxx
Penyesuaian untuk:		
Depresiasi	xxx	xxx
Penghasilan investasi	(xxx)	(xxx)
Penurunan piutang bunga	xxx	xxx
Penurunan dalam pendapatan diterima di muka	(xxx)	(xxx)
Penurunan dalam utang jangka pendek	(xxx)	(xxx)
Sumbangan yang dibatasi untuk investasi	(xxx)	(xxx)
Kas yang dihasilkan dari operasi	xxx	xxx
Pembayaran bunga	(xxx)	(xxx)
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(xxx)	(xxx)
Penerimaan dari penjualan investasi	xxx	xxx
Penerimaan hasil investasi	xxx	xxx
Pembelian investasi	(xxx)	(xxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
AKTIVITAS PENDANAAN		
<i>Penerimaan dari sumbangan dibatasi untuk:</i>		
Investasi dalam dana abadi (endowment)	xxx	xxx
Investasi dalam bangunan	xxx	xxx
Aktivitas pendanaan lain:		
Pembayaran utang jangka panjang	(xxx)	(xxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	xxx	xxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	xxx	xxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

Gambar 2. 7 Laporan Arus Kas (Metode Tidak Langsung)
Sumber : ISAK 35

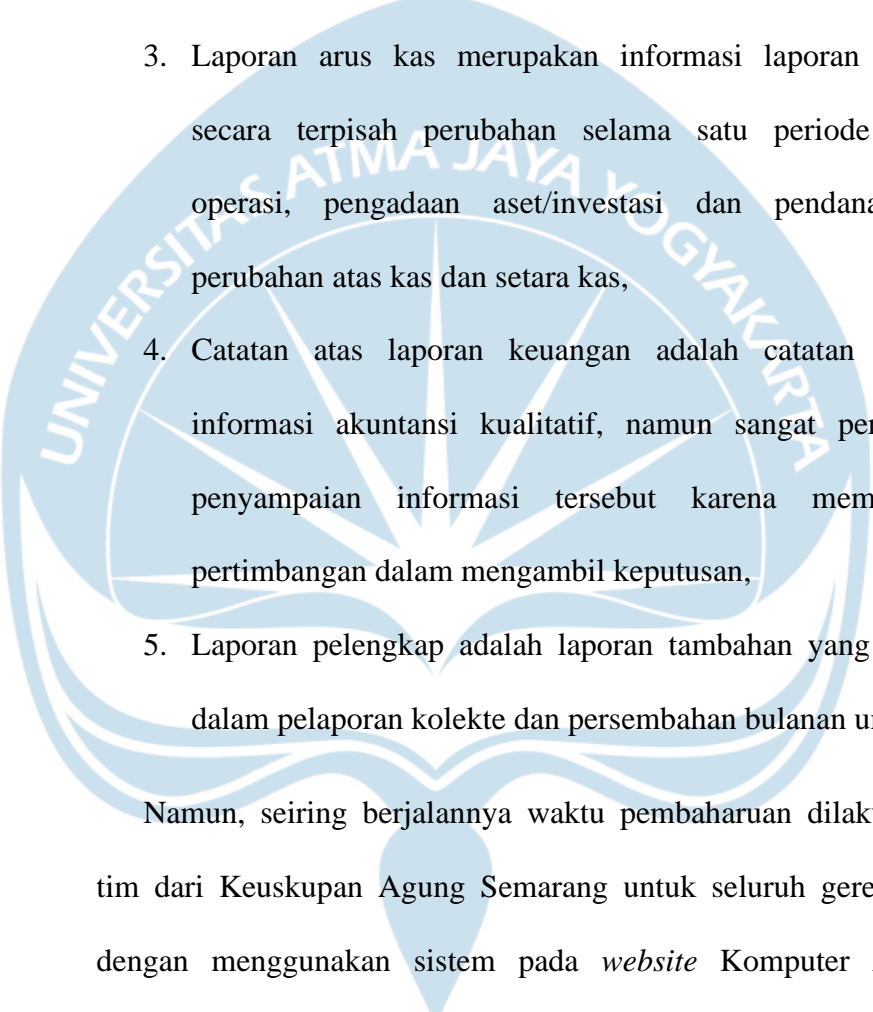
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menguraikan kebijakan pengungkapan serta menyediakan informasi dalam jutaan rupiah yang nantinya akan diungkapkan oleh entitas nonlaba.

2.4.3. PTKAP 2018

Laporan keuangan paroki menurut PTKAP 2018 merupakan informasi keuangan sebagai dasar dalam mengambil keputusan berbagai kebijakan dalam reksa pastoral paroki. Informasi laporan tersebut nantinya akan membantu Dewan Paroki dan Keuskupan dalam *me-review* serta mengevaluasi kinerja Dewan Paroki. Adapun teknis dan jenis dalam pembuatan laporan keuangan paroki diatur dalam PTKAP. Pada Gereja Kristus Raja Baciro dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangannya salah satunya menggunakan pedoman buku PTKAP 2018.

PTKAP atau Petunjuk Teknis Keuangan Akuntansi Paroki merupakan pedoman dalam pembuatan laporan keuangan paroki. Dalam buku PTKAP 2018 memuat jenis laporan keuangan yang dapat dibuat oleh bendahara paroki gereja. Selain itu PTKAP 2018 juga menjelaskan beberapa teknis penting dalam setiap pembuatan satu jenis laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disusun pada buku ini adalah sebagai berikut:

- 
1. Laporan aktivitas menyediakan informasi mengenai penerimaan dan beban paroki dalam waktu tertentu,
 2. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan untuk menyajikan informasi aset, kewajiban, dan aset bersih,
 3. Laporan arus kas merupakan informasi laporan keuangan secara terpisah perubahan selama satu periode aktivitas operasi, pengadaan aset/investasi dan pendanaan pada perubahan atas kas dan setara kas,
 4. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan mengenai informasi akuntansi kualitatif, namun sangat perlu dalam penyampaian informasi tersebut karena mempengaruhi pertimbangan dalam mengambil keputusan,
 5. Laporan pelengkap adalah laporan tambahan yang berkaitan dalam pelaporan kolekte dan persembahan bulanan umat.

Namun, seiring berjalannya waktu pembaharuan dilakukan oleh tim dari Keuskupan Agung Semarang untuk seluruh gereja katolik dengan menggunakan sistem pada *website* Komputer Akuntansi Paroki atau disebut KAP untuk mempermudah dalam menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang terdapat pada *website* KAP KAS diantaranya adalah:

1. Laporan aktivitas,
2. Laporan posisi keuangan,
3. Laporan realisasi anggaran,

4. Jurnal umum,
5. Buku besar.

2.4.4. PPAP 2018

PPAP atau Petunjuk Penyusunan Laporan Keuangan Paroki merupakan dasar yang digunakan oleh gereja dalam menyusun laporan keuangan yang relevan. Gereja menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak eksternal ataupun umat yaitu dengan menyajikan laporan keuangannya.

Adapun acuan pada PPAP 2018 yaitu:

1. Ajaran-ajaran yang ada dalam Kitab Suci, Ajaran Gereja, ketentuan yang dikeluarkan oleh Gereja umum, Gereja setempat dan Keuskupan Agung Semarang,
2. Prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK),
3. Peraturan perundang-undangan yang tepat dengan laporan keuangan,
4. Paroki diwajibkan untuk mengikuti ketentuan dari Keuskupan Agung Semarang, jika PSAK Ikatan Akuntansi Indonesia memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi.

Ketetapan lainnya yang diatur dalam PPAP 2018 yaitu:

1. Transaksi keuangan yang dimuat pada buku ini diutamakan disetiap paroki untuk transaksi yang umumnya terjadi,

2. Transaksi keuangan memerlukan penanganan kompleks, jika diperlukan oleh Keuskupan akan diatur lebih lanjut pada PTKAP sesuai dengan keperluan,
3. Apabila transaksi keuangan khusus diperlukan dan dipandang masih perlu ditambah untuk dituangkan dalam petunjuk ini bisa disampaikan ke Keuskupan Agung Semarang supaya dapat ditindaklanjuti,
4. Petunjuk ini akan disesuaikan dan dievaluasi menurut perkembangan transaksi keuangan yang terjadi ketentuan SAK, peraturan perundang-undangan dan ketentuan Keuskupan Agung Semarang yang terkait.

2.4.4.1. Proses Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Paroki

Menurut PPAP 2018, proses akuntansi merupakan rangkaian kegiatan akuntansi dalam menyusun sebuah laporan keuangan secara sistematis dan mudah dipahami. Proses akuntansi ini dimulai dari menganalisa dan mencatat transaksi keuangan yang terjadi dalam setiap akun/pos yang sesuai, mengklasifikasikan transaksi keuangan dengan menyajikan secara sistematis dan mengkomunikasikan laporan kepada pengguna.

Saat ini kegiatan dalam penyajian laporan keuangan gereja sudah mulai menggunakan sistem komputerisasi yang dimana Keuskupan Agung Semarang memfasilitasi penyajian laporan dengan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh keuskupan yang

bernama Komputer Akuntansi Paroki atau KAP. Hal ini membuat seluruh gereja katolik menyesuaikan dalam penginputan laporan keuangan.

Tabel 2. 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Judul	Peneliti	Hasil
Evaluasi Implementasi Pelaporan Keuangan Sebagai Bentuk Akuntabilitas Organisasi Keagamaan (Studi Kasus: Gereja Katolik Paroki St. PaulusMiki Salatiga)	Gedi Raya (2017)	Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga sudah menerapkan laporan keuangannya sesuai dengan standar umum Keuskupan yaitu PTKAP yang mengacu PSAK 45, tetapi mengenai kebijakan akuntansi yang dijalankan oleh paroki belum diinformasikan secara detail dalam Catatan Atas Laporan Keuangannya. Pada pencatatan dan penyajian Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas terlihat adanya perbedaan yang dibuat paroki terhadap PSAK 45 revisi th 2011.
Implementasi ISAK 35 (Nirlaba) Pada Organisasi Non Laba (Masjid, Sekolah, Kursus)	Setiadi (2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masjid rata-rata tidak membuat laporan keuangan berdasarkan PSAK 45. Bentuk Informasi laporan kas masuk dan laporan kas keluar dibuat secara sederhana oleh Masjid untuk pencatatannya. 2. Kurangnya pengetahuan tentang standarisasi Laporan Keuangan maka masih banyak organisasi nirlaba di Indonesia yang belum menggunakan ISAK 35.

<p>Evaluasi Implementasi Laporan Keuangan Sebagai Bentuk Akuntabilitas Gereja Katolik Saint Stanislaus Girisonta</p>	<p>Setiawan (2014)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gereja sudah menyesuaikan PSAK No 45 revisi 2011 untuk hasil laporan keuangannya yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun gereja masih menggunakan nama akun lama berupa Aktiva, Kewajiban dan Aktiva Bersih seharusnya Aset, Liabilitas, dan Aset Neto. 2. Laporan Keuangan yang dibuat gereja dipertanggungjawabkan kepada Keuskupan Agung Semarang tiap bulan dan diaudit oleh Ekonomat Keuskupan Agung Semarang, sehingga laporan keuangannya andal, berkualitas dan akuntabel. 3. Laporan Keuangan gereja selalu dilaporkan dalam Rapat Pleno tiga kali dalam setahun yang dihadiri pengurus gereja. 4. Akuntabilitas gereja sudah baik dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ke bawah yang disampaikan pada Rapat Pleno. Tetapi belum seluruh umat mengetahui sehingga masih ada yang mempertanyakan terkait laporan keuangan gereja.
--	------------------------	---

Sumber: Penelitian-Penelitian Terdahulu